



Warga Minta Tenggat Waktu

■ KAI Minta Batas Pengosongan Rumah Dinas Lempuyangan Akhir Juli

YOGYA. TRIBUN - PT KAI meminta warga yang menempati bangunan rumah dinas di Tegal Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta untuk melakukan pengosongan tempat secara sukarela maksimal akhir Juli 2025. Namun, warga meminta tenggat waktu untuk pengosongan rumah.

Pernyataan ini disampaikan Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, Rabu (18/6). Dia mengatakan sesuai yang disampaikan saat pertemuan dengan warga setempat pada Selasa (17/6) kemarin, beberapa usulan warga akan tetap disampaikan kepada manajemen.

"Dan hasil keputusan manajemen tetap sesuai informasi awal yang disampaikan ke warga yakni batas akhir pengosongan secara sukarela sampai akhir Juli 2025," katanya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada warga Tegal Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta yang menempati rumah dinas di sekitar Stasiun Lempuyangan.

Surat ini menandai fase akhir dari proses penataan kawasan stasiun yang telah melalui tahapan sosialisasi dan mediasi dua kali SP. Dalam SP3 tersebut, PT KAI kembali meminta warga melakukan pengosongan atau pembongkaran bangunan tambahan secara mandiri.

Permintaan terakhir
Pembongkaran bangunan tambahan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah surat diterima. Warga yang terancam

PENERTIBAN

- PT KAI meminta warga di Tegal Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta untuk mengosongkan rumah pada akhir Juli 2025.
- Warga meminta tenggat waktu untuk pengosongan rumah.
- Dalam SP3 tersebut, PT KAI kembali meminta warga melakukan pengosongan atau pembongkaran bangunan tambahan secara mandiri.
- Warga meminta penertiban dilakukan setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang.

pengusuran tersebut pun menemui pimpinan PT KAI di Kantor Daop 6 Yogyakarta, Selasa (17/6) sore.

Mereka akhirnya menerima keputusan PT KAI untuk pergi dari kawasan Stasiun Lempuyangan.

Namun, mereka menyampaikan satu permintaan terakhir agar penertiban dilakukan setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang.

"Poinnya (pertemuan dengan KAI), kami ingin mendengarkan isi surat dari SP3 yang disampaikan KAI. Sikap warga adalah meminta supaya bisa melaksanakan peringatan Agustusan untuk terakhir kalinya (di Lempuyangan). Setelah itu, terserah KAI mau ngapain. Termasuk melakukan penertiban? Ya

silakan," papar juru bicara warga Lempuyangan, Foky Ardiyanto, saat dikonfirmasi Rabu (18/6).

Permintaan itu, menurut Foky sangat berkaitan dengan momen kebangsaan. Warga Lempuyangan ingin memiliki momen terakhir merayakan kemerdekaan di rumah yang mereka tempati selama puluhan tahun. Bahkan, tempat sebagian warga lahir dan besar.

Permintaan tenggat waktu satu bulan tersebut mestinya tidak memberatkan PT KAI. Apalagi izin tinggal sementara warga juga masih sampai Oktober 2025 mendatang.

"Yang namanya palilah (izin tinggal sementara) itu juga baru habis Oktober. Jadi mundur sesasi [sebulan] itu ya masuk akal," ucapnya.

Terkait kompensasi yang didapat warga, Foky menilai besaran uang yang diberikan KAI dan Keraton dinilai warga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar warga untuk bertempat tinggal. Apalagi, mereka harus pergi dari rumah dan harus mencari tempat tinggal baru.

Karenanya warga meminta ada pengukuran ulang. Saat ini, Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah di Lempuyangan telah mengalokasikan Rp56 juta sebagai bebungah per rumah untuk warga. Namun, baru Rp3 juta dana bebungah yang dicairkan.

Sedangkan kompensasi dari KAI berkisar Rp50 juta. Kedua kompensasi tersebut diklaim warga tidak bisa digunakan untuk mendapatkan rumah baru pengganti. (bda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005